

KEBERLANJUTAN PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA PASCA KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS (KHDPK)

ARY WIDIYANTO



**PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU PENGELOLAAN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**



- 

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Keberlanjutan Perhutanan Sosial di Jawa Pasca Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2026
Ary Widiyanto

E1601231001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



RINGKASAN

ARY WIDIYANTO. Keberlanjutan Perhutanan Sosial di Jawa Pasca Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Dibimbing Oleh DODIK RIDHO NURROCHMAT, SONI TRISON, dan SUBARUDI

Perhutanan Sosial (PS) di Pulau Jawa sudah dimulai sejak tahun 1972 ketika Perhutani meluncurkan program Mantri-Lurah, atau juga yang dikenal sebagai *prosperity approach*. Meskipun sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat belum optimal, bahkan kondisi lingkungan hutan makin terdegradasi. Untuk mengatasi hal ini Kementerian Kehutanan (atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum Oktober 2024) mengambil alih sekitar 1,1 juta hektar di Jawa untuk dikelola menjadi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Kebijakan ini diambil untuk mengatasi dua permasalahan utama pengelolaan hutan di Jawa yaitu konflik tenurial dan lahan kritis, yang selama ini tidak dapat ditangani oleh Perum Perhutani. Kebijakan ini memiliki enam kepentingan, yaitu 1) perhutanan sosial, 2) penataan kawasan, 3) penggunaan kawasan, 4) rehabilitasi hutan, 5) perlindungan hutan, dan 6) pemanfaatan jasa lingkungan.

Penelitian berfokus pada empat aspek pada PS di KHDPK. Pertama penelitian ini bertujuan menyelidiki bagaimana latar belakang dikeluarkannya kebijakan KHDPK dan kinerja PS sebelum KHDPK, transformasi kelembagaan, dan reaksi para pihak terhadap kebijakan tersebut. Sebagai kebijakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja No 11 tahun 2020 (kemudian dirubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023) kebijakan ini mendapat pro-kontra di masyarakat, akademisi, politisi, BUMN bidang kehutanan, dan pemerhati lingkungan hidup dan kehutanan. Di satu sisi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi lebih kepada Masyarakat sekaligus menyelesaikan permasalahan tenurial. Di sisi lain kebijakan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar, dengan diberikannya akses yang lebih besar kepada para pemegang izin. Untuk mencapai tujuan ini digunakan analisis diskursus, dengan pengambilan data menggunakan analisis konten.

Kedua, penelitian ini bertujuan mengetahui kelembagaan PS di KHDPK. Kelembagaan PS dikaji menggunakan metode *Institutional Analysis and Development* (IAD). Lebih lanjut, beberapa aspek kelembagaan lain yang dikaji meliputi *stakeholder/actor*, *bundles & transfer of right*, dan akses. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberlanjutan PS di KHDPK. Keberlanjutan PS di KHDPK diukur dengan dua pendekatan yaitu 1) penapisan terhadap penerimaan sosial, kelayakan ekonomi, dan kesesuaian ekologi/tempat tumbuh. dan 2) menggunakan *Rapid Appraisal for Social Forestry* (Rap-SF) yang terdiri dari *Multidimensional Scale Analysis* (MDS), *Monte Carlo*, and *Leverage*.

Terakhir penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi berdasarkan hasil pada tiga tujuan penelitian sebelumnya. Strategi kebijakan dilakukan dengan menggunakan analisis prospektif. Tahap akhir dari analisis prospektif adalah membangun skenario strategis model pengelolaan perhutanan sosial berkelanjutan. Skenario ini menggabungkan beberapa kondisi variabel kunci yang mungkin

terjadi. Dalam penelitian ini, skenario dikelompokkan menjadi tiga klaster skenario, yaitu skenario pesimis, skenario moderat, dan skenario optimis.

Temuan penelitian memiliki implikasi signifikan bagi kebijakan pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial. Perumusan kebijakan yang tepat memerlukan informasi dari berbagai aspek. Hasil menunjukkan bahwa keberlanjutan PS di KHDPK pada posisi kurang berkelanjutan untuk dimensi ekonomi dan cukup berkelanjutan untuk dimensi sosial, ekologi, kelembagaan, serta akses dan teknologi. Kegiatan multi usaha kehutanan juga layak diusahakan dalam kegiatan PS di KHDPK dan secara sosial jenis yang ditanam adalah jenis yang diterima oleh masyarakat. Meskipun demikian secara ekologi terdapat beberapa jenis tanaman yang kurang cocok dengan kondisi iklim mikro setempat, sehingga berpotensi menyebabkan produksi yang kurang optimal. Akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan juga lebih besar, jika dibandingkan dengan Perhutanan Sosial pada saat di bawah Perum Perhutani. Aktor dalam PS di KHDPK juga sangat beragam, dimana aktor yang dominan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pendamping perhutanan sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pengujian teori desentralisasi dan devolusi kehutanan, sebagai salah satu kunci sukses keberlanjutan pengelolaan hutan. Sampai dengan saat ini desentralisasi selalu identik diikuti dengan devolusi. Dalam kebijakan PS di KHDPK, ditemukan tingkat penyerahan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat (devolusi), pada saat kebijakan ini justru mengarah ke sentralisasi pengelolaan, dengan penarikan kewenangan ke Kementerian Kehutanan. Kontribusi lain adalah beberapa rekomendasi kebijakan terkait untuk meningkatkan kinerja PS dan menjamin keberlanjutannya. Beberapa diantaranya meliputi; pola tanam dan jenis tanaman, jumlah pendamping PS, pengelolaan aset, dan perlunya lembaga di tingkat tapak.

Penelitian di masa depan perlu mengkaji dampak dari kebijakan KHDPK terhadap kondisi lingkungan dengan berbasis teknologi GIS juga diperlukan. Akses besar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat perlu dikontrol untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan yang salah satunya diindikasikan dengan jumlah tutupan pohon di kawasan hutan.

Kata kunci: Perhutanan sosial, KHDPK, keberlanjutan, akses, devolusi, multi-usaha kehutanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



SUMMARY

ARY WIDIYANTO. *Sustainability of Social Forestry in Java Post Forest Area with Special Management (KHDPK). Supervised by DODIK RIDHO NURROCHMAT, SONI TRISON, and SUBARUDI*

Social Forestry (SF) in Java was started in 1972 when Perhutani launched the Mantri-Lurah program, also known as the prosperity approach. Although it has been going on for more than 50 years, the economic benefits received by the community have not been optimal, even though the condition of the forest environment is increasingly degraded. To overcome this, the Ministry of Forestry (or the Ministry of Environment and Forestry before October 2024) took over around 1.1 million hectares in Java to be managed as a Forest Area with Special Management (KHDPK). This policy was adopted to address two major forest management issues in Java: tenure conflicts and critical land, which Perum Perhutani has been unable to address. This policy has six objectives: 1) social forestry, 2) regional planning, 3) land use, 4) forest rehabilitation, 5) forest protection, and 6) utilization of environmental services.

The research focuses on four main aspects of SF in KHDPK. First, this research aims to investigate the background of the issuance of the KHDPK policy, institutional transformation, and the reactions of the parties to the policy. As a derivative policy of the Job Creation Law No. 11 of 2020 (later amended to Law No. 6 of 2023), this policy has received pros and cons in the community, academics, politicians, BUMN in the forestry sector, and environmental and forestry observers. On the one hand, this policy is expected to provide more economic benefits to the community while solving tenurial problems. On the other hand, this policy is feared to cause greater environmental damage by providing greater access to permit holders. To achieve this goal, discourse analysis is used, with data collection using content analysis. Second, this study aims to determine the SF institution in KHDPK. The SF institution is studied using the Institutional Analysis and Development (IAD) method. Furthermore, several other institutional aspects studied include stakeholders/actors, bundles & transfer of rights, and access. Third, this study aims to determine the level of sustainability of SF in KHDPK. The sustainability of SF in KHDPK is measured by two approaches, namely 1) screening for social acceptance, economic feasibility, and suitability of growing sites. and 2) using Rapid Appraisal for Social Forestry (Rap-SF), consisting of Multidimensional Scale Analysis (MDS), Monte Carlo, and Leverage. Finally, this study aims to formulate a strategy based on the results of the three previous research objectives. The policy strategy is carried out using prospective analysis. The final stage of prospective analysis is to build a strategic scenario for a sustainable social forestry management model. This scenario combines several key variable conditions that may occur. In this study, the scenarios are grouped into three scenario clusters, namely the pessimistic scenario cluster, the moderate scenario cluster, and the optimistic scenario cluster.

The research findings have significant implications for forest management policies through Social Forestry. Proper policy formulation requires information from various aspects. The results show that the sustainability of SF in KHDPK is

in a less sustainable position for the economic dimension and quite sustainable for the social, ecological, institutional, and access and technology dimensions. Multi-forestry business activities are also feasible in SF activities in KHDPK, and socially, the types planted are types that are preferred by the community. However, ecologically, several types of plants are less suitable for local microclimate conditions, thus potentially causing less than optimal production. Community access to forest resources is also greater when compared to Social Forestry, when it was under Perum Perhutani. Actors in SF in KHDPK are also very diverse, where the dominant actors are the Ministry of Environment and Forestry, social forestry assistants, and Non-Governmental Organizations (NGOs).

The main contribution of this study is the testing of the theory of decentralization and forestry devolution, as one of the keys to the success of sustainable forest management. Until now, decentralization has always been identical to devolution. In the SF policy in KHDPK, a greater level of authority transfer to the community (devolution) was found at a time when this policy was leading to the centralization of management, with the withdrawal of authority to the Ministry of Forestry. Another contribution is several policy recommendations related to improving SF performance and ensuring its sustainability. Some of them include planting patterns and types of plants, the number of SF assistants, asset management, and the need for institutions at the site level.

Future research needs to study the impact of the KHDPK policy on environmental conditions, based on GIS technology is also needed. The large amount of access given by the government to the community needs to be controlled to avoid environmental degradation, one of which is indicated by the amount of tree cover in the forest area.

Keywords: Social forestry, KHDPK, sustainability, access, devolution, multi-business forestry

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2026 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

KEBERLANJUTAN PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA PASCA KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS (KHDPK)

ARY WIDIYANTO

Disertasi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Gelar Doktor di
Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU PENGELOLAAN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Penguji Luar Komisi Pembimbing pada Ujian Tertutup Disertasi:

1. Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS
2. Dr.Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.

Penguji Luar Komisi Pembimbing pada Sidang Promosi Terbuka Disertasi:

1. Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS
2. Dr.Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.



Judul Disertasi : Keberlanjutan Perhutanan Sosial di Jawa Pasca Kawasan
Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)
Nama : Ary Widiyanto
NRP : E1601231001

@Hak cipta milik IPB University

Pembimbing 1
Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc.F.Trop.

Pembimbing 2
Dr. Soni Trison, S.Hut., M.Si.

Pembimbing 3
Prof (Ris). Dr. Ir. Subarudi, M.Wood.Sc.

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi:
Prof. Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr.Sc.
NIP.19611126 198601 1 001

Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan:
Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc.F.Trop.
NIP. 19700329 199608 1 001

Tanggal Ujian: 16 September 2025

Tanggal Lulus:

09 JAN 2026



- 

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga disertasi ini berhasil diselesaikan. Topik yang dipilih dalam disertasi ini adalah “KEBERLANJUTAN PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA PASCA KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS (KHDPK)”.

Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik karena dukungan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penghargaan dan terimakasih diberikan kepada semua pihak yang mendukung terselesainya disertasi ini:

1. Prof. Dr Ir Dodik Ridho Nurrochmat, MSc.F.Trop., Dr. Soni Trison, S. Hut., M.Si., dan Prof (Ris) Dr. Ir. Subarudi, M.Wood.Sc. sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran kepada penulis selama menyelesaikan proposal penelitian ini.
2. Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS dan Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. selaku penguji luar pada ujian tertutup dan sidang promosi.
3. Prof.Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr.Sc. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan dan seluruh staf pengajar dan pegawai Program Studi IPH, khususnya Bapak Akhmad Fatoni atas bantuan dan pelayanannya.
4. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB beserta staf pegawai atas segala pelayanan yang telah diberikan.
5. Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB beserta staf pegawai atas segala bantuan dan perhatiannya.
6. Kepala Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB beserta staf pegawai atas segala bantuan dan dukungannya.
7. Kepala BRIN, Kepala BOSDM BRIN dan staff, khususnya Manajemen Talenta yang memberikan beasiswa program *Degree by Research* (DBR).
8. Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dr. Ali Yansyah Abdurrahim yang telah memberikan izin, rekomendasi, dan dukungan.
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Direktur serta Kasubdit dan Kepala Balai pada Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan.
10. Kedua orang tua saya Tamim Suaidi dan Umi Lestari yang telah memberikan segalanya mulai dari lahir sampai dengan saat ini.
11. Istriku dan anak-anakku tercinta: Erna Hernawati, Anisa Indriani Widiyanto, Azzahra Maulida Widiyanto, dan Althafarizqi Novrian Widiyanto, serta kedua mertua H. Jejen dan Uum Musliawati, dan adik atas doa dan dukungannya.
12. Kang Darsono Priono yang sudah banyak membantu proses pengambilan data.
13. Rekan-rekan seangkatan serta seluruh Mahasiswa IPH.
14. Rekan-rekan kelompok riset Penduduk dan Pengelolaan Sumberdaya Alam PRK BRIN yang selalu memberikan dukungan.
15. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu-persatu

Teriring doa semoga Allah SWT membalaskan budi baik semuanya. Disadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan kritik dan saran bagi perbaikan disertasi saya ini.

Bogor, Januari 2026
Ary Widiyanto



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	12
1.6 <i>Research Gap</i>	12
1.7 Kebaruan (<i>Novelty</i>)	13
1.8 <i>Theoretical Framework</i>	14
II KINERJA PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA SEBELUM	
KHDPK	
2.1 Abstrak	16
2.2 Pendahuluan	16
2.3 Metode Penelitian	18
2.4 Hasil dan Pembahasan	19
2.5 Tantangan Perhutanan Sosial di Masa Depan	29
2.6 Peluang Kajian Perhutanan Sosial	30
2.7 Simpulan	31
III BABAK BARU PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA: ANALISIS	
DISKURSUS DALAM PENGELOLAAN HUTAN	
3.1 Abstrak	32
3.2 Pendahuluan	32
3.3 Landasan Teori	35
3.4 Metode Penelitian	37
3.5 Hasil dan Pembahasan	39
3.6 Simpulan	50
IV TRANSFORMASI PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA	
DAN KHDPK	
4.1 Abstrak	51

4.2 Pendahuluan	51
4.3 Metode Penelitian	53
4.4 Hasil dan Pembahasan	54
4.5 Simpulan	68
V ANALISIS KELEMBAGAAN PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA PASCA KHDPK	
5.1 Abstrak	69
5.2 Pendahuluan	69
5.3 Metode Penelitian	71
5.4 Hasil dan Pembahasan	73
5.5 Simpulan	85
VI AKSES DAN <i>TRANSFER OF RIGHTS</i> DALAM PERHUTANAN SOSIAL DI KHDPK	
6.1 Abstrak	86
6.2 Pendahuluan	86
6.3 Metode Penelitian	88
6.4 Hasil dan Pembahasan	90
6.5 Simpulan	95
VII KELAYAKAN MULTIUSAHA KEHUTANAN PADA PERHUTANAN SOSIAL DI KHDPK	
7.1 Abstrak	96
7.2 Pendahuluan	96
7.3 Metode Penelitian	99
7.4 Hasil dan Pembahasan	103
7.5 Simpulan	111
VIII KEBERLANJUTAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL PASCA KHDPK	
8.1 Abstrak	112
8.2 Pendahuluan	112
8.3 Metode Penelitian	115
8.4 Hasil dan Pembahasan	121
8.5 Simpulan	140
IX PEMBAHASAN UMUM	
9.1 Hubungan Antara Permasalahan, Dimensi/Aspek, Metode dan Hasil Kajian	141
9.2 Strategi Pengembangan PS di KHDPK dengan Multi Usaha	

Kehutanan Berbasis Potensi Lokal	145
9.3 Pembagian Peran Para Aktor dalam PS di KHDPK	148
9.4 Peran Perhutanan Sosial Berkelanjutan dalam Pembangunan Regional	151
9.5 Kontribusi Teori: Devolusi Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial di KHDPK	154
9.6 Tantangan Kebijakan KHDPK	159
9.7 Penutup	160
X SIMPULAN DAN SARAN	
10.1 Simpulan	162
10.2 Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	166
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	185
LAMPIRAN	186



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian kewenangan pengelolaan hutan di Pulau Jawa pasca PP No 23 tahun 2023	3
Tabel 1.1 Permasalahan dalam Perhutanan Sosial	7
Tabel 2.1 Skema Perhutanan Sosial, Tipe Kepemilikan Hutan dan Tipe Kawasan Hutan	20
Tabel 2.2 Kajian perhutanan sosial berdasarkan skema, aspek, dan lokasi	23
Tabel 2.3 Kinerja perhutanan sosial berdasarkan aspek kajian	28
Tabel 3.1 Perbandingan antara skema PS Kulin KK dan IPHPS	33
Tabel 3.2 Beberapa kejadian penting setelah dikeluarkannya kebijakan KHDPK	44
Tabel 3.3 Profil pembuat pernyataan berdasarkan afiliasinya	45
Tabel 3.4 Posisi kepentingan penulis berdasarkan saluran	45
Tabel 3.5 Posisi aktor dalam menanggapi KHDPK	46
Tabel 3.6 Potensi permasalahan kebijakan KHDPK	47
Tabel 3.7 Perbedaan Skema PS yang dikelola Perum Perhutani dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48
Tabel 4.1 Perkembangan perhutanan sosial di Indonesia	55
Tabel 4.2 Luas Kawasan Hutan di Pulau Jawa	57
Tabel 4.3 Luas KHDPK Tiap Provinsi dan Per Fungsi Kawasan Hutan	57
Tabel 4.4 Isu strategis pengelolaan KHDPK	58
Tabel 4.5 Luas indikatif peruntukan KHDPK berdasarkan peruntukan tiap fungsi hutan	59
Tabel 4.6 Evaluasi <i>Ostrom's Eight Principles</i> dalam Perhutanan Sosial di KHDPK	60
Tabel 5.1 Peraturan tentang Perhutanan Sosial sebelum dan sesudah UUCK	75
Tabel 5.2 Posisi para aktor dalam pengelolaan PS	77
Tabel 5.3 Skenario kondisi tegakan pohon berdasarkan kondisi eksisting	82
Tabel 5.4 Evaluasi capaian dan interaksi Perhutanan Sosial di KHDPK dalam Kerangka IAD	83
Tabel 6.1 <i>Bundles of Rights</i> dengan Posisi	89
Tabel 6.2 Gambaran umum Perhutanan Sosial di lokasi penelitian	90
Tabel 6.3 Perbandingan pemanfaatan sumberdaya hutan sebelum dan sesudah Perhutanan Sosial di KHDPK	91
Tabel 6.4 Akses masyarakat terhadap berbagai sumber per desa	92
Tabel 6.5 <i>Bundles of Right</i> dalam Perhutanan Sosial di KHDPK	93
Tabel 7.1 Pemilihan jenis tanaman utama oleh masyarakat di lokasi penelitian	103
Tabel 7.2 Kelayakan finansial Multiusaha Kehutanan (MUK) pada PS di KHDPK	105
Tabel 7.3 Kesesuaian ekologi jenis tanaman utama di lokasi penelitian	107
Tabel 7.4 Kegiatan dalam Perhutanan Sosial di KHDPK sesuai peraturan yang berlaku	108
Tabel 7.5 Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan yang dapat dikembangkan	109
Tabel 8.1 Hasil Analisis MDS	121

Tabel 8.2 Hasil analisis status keberlanjutan masing-masing desa	122
Tabel 8.3 Faktor pengungkit dimensi keberlanjutan pengelolaan perhutanan sosial	132
Tabel 8.4 Keadaan faktor kunci dan kemungkinan perubahan ke depan dalam pengelolaan perhutanan sosial berkelanjutan	136
Tabel 8.5 Nilai indeks dan status keberlanjutan hasil pengembangan kebijakan	136
Tabel 9.1 Pembagian peran para aktor dalam PS di KHDPK	148
Tabel 9.2 Kontribusi Perhutanan Sosial di KHDPK terhadap pendapatan total	152
Tabel 9.3 Perbedaan pengelolaan PHBM dengan PS di KHDPK	153
Tabel 9.4 Perbedaan desentralisasi dan devolusi dalam pengelolaan hutan	157
Tabel 9.5 Pelimpahan wewenang dalam pengelolaan Perhutanan Sosial di Jawa	158



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sebaran penelitian Perhutanan Sosial di Indonesia (2014-2023)	6
Gambar 1.2 Kerangka rumusan masalah penelitian	10
Gambar 1.3. <i>Theoretical framework</i>	15
Gambar 2.1 Tahapan dalam <i>Systematic Literature Review</i> (SLR)	19
Gambar 2.2 Tahapan pemilihan literatur menggunakan SLR	22
Gambar 3.1 <i>Study Framework</i> dalam analisis diskursus	37
Gambar 3.2 Media online yang paling banyak diakses di Indonesia berdasarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap isi berita	38
Gambar 3.3 Sejarah pengelolaan hutan di Jawa	42
Gambar 3.4 Publikasi terkait KHDPK (2012-2023)	44
Gambar 4.1 Peta Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus	58
Gambar 4.2 <i>Path dependencies</i> dalam KHDPK	64
Gambar 4.3 <i>Critical junctures</i> dalam KHDPK	67
Gambar 5.1 <i>Institutional Analysis and Development</i> (IAD) Framework	72
Gambar 5.2 Tahapan pengumpulan dan analisis data	73
Gambar 5.3 Alokasi areal KHDPK berdasarkan Provinsi	75
Gambar 5.4 Situasi aksi dalam perhutanan sosial di KHDPK	77
Gambar 5.5 Matriks pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan	79
Gambar 7.1 Lokasi Penelitian di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran	99
Gambar 7.2 Konsep dalam seleksi pemanfaatan hutan	100
Gambar 7.3 Gambaran umum model pengembangan Multi Usaha Kehutanan (MUK) berdasarkan potensi daerah	109
Gambar 8.1 Tahapan alur penelitian analisis keberlanjutan	119
Gambar 8.2 Diagram layang-layang status keberlanjutan setiap dimensi	122
Gambar 8.3 Hasil RAP-FS analisis untuk dimensi ekonomi	123
Gambar 8.4 Hasil analisis leverage untuk dimensi ekonomi	124
Gambar 8.5 Hasil RAP-FS analisis untuk dimensi sosial	125
Gambar 8.6 Hasil analisis leverage untuk dimensi sosial	126
Gambar 8.7 Hasil RAP-FS analisis untuk dimensi ekologi	127
Gambar 8.8 Hasil analisis leverage untuk dimensi ekologi	128
Gambar 8.9 Hasil RAP-FS analisis untuk dimensi kelembagaan	129
Gambar 8.10 Hasil analisis leverage untuk dimensi kelembagaan	130
Gambar 8.11 Hasil RAP-FS analisis untuk dimensi akses dan teknologi	131
Gambar 8.12 Hasil analisis leverage untuk dimensi akses dan teknologi	132
Gambar 8.13 Tingkat kepentingan faktor-faktor yang berpengaruh dalam sistem pengelolaan berkelanjutan perhutanan sosial	133
Gambar 8.14 Diagram layang-layang peningkatan indeks per dimensi keberlanjutan hasil skenario pengembangan perhutanan sosial di KHDPK	137
Gambar 8.15 Hubungan antara faktor leverage dan faktor kunci	138
Gambar 9.1 Hubungan antara permasalahan penelitian dan metode yang digunakan	141
Gambar 9.2 Metode dan hasil utama kajian dimensi ekonomi	142
Gambar 9.3 Metode dan hasil utama kajian dimensi sosial	143
Gambar 9.4 Metode dan hasil utama kajian dimensi ekologi	143

Gambar 9.5 Metode dan hasil utama kajian dimensi kelembagaan	144
Gambar 9.6 Metode dan hasil utama kajian dimensi akses dan teknologi	145
Gambar 9.7 Kontribusi agroforestri bagi pendapatan jangka pendek, menengah, dan panjang petani	146
Gambar 9.8 Contoh Agro-silvo-pasture & fishery di Desa Jadikarya, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran	147



DAFTAR SINGKATAN

BPHD	: Badan Pengelola Hutan Desa
BUMDES	: Badan Usaha Milik Desa
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CDK	: Cabang Dinas Kehutanan
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
HA	: Hutan Adat
HD	: Hutan Desa
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HPD	: Hutan Pangkuan Desa
HR	: Hutan Rakyat
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
IPPKH	: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Kemenhut	: Kementerian Kehutanan
KHDPK	: Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus
Kepmen	: Keputusan Menteri
KK	: Kemitraan Kehutanan
KKP	: Kemitraan Kehutanan Perhutani
KKPP	: Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPS	: Kelompok Perhutanan Sosial
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KUPS	: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LMDH	: Lembaga Masyarakat Desa Hutan
LPHD	: Lembaga Pengelola Hutan Desa
Permen	: Peraturan Menteri
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
Perpres	: Peraturan Presiden
PIAPS	: Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
PP	: Peraturan Pemerintah
PPKH	: Pinjam Pakai Kawasan Hutan
PS	: Perhutanan Sosial
RHL	: Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SK	: Surat Keputusan
TMKH	: Tukar Menukar Kawasan Hutan
UU	: Undang-Undang

Catatan: Penggunaan KLHK dan Kementerian Kehutanan menyesuaikan konteks dalam kalimat atau paragraf. Penelitian ini dilakukan pada saat masih bernama KLHK sedangkan disertasi disusun pada saat sudah berubah menjadi Kementerian Kehutanan.